

## Kiai dan Strukturasi Kekuasaan di Pandeglang, Banten

M. Dian Hikmawan<sup>1</sup>, M. Rizky Godjali<sup>2</sup>, Ika Arinia Indriyany<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Departemen Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Received: 6 Januari 2020

Revised: 21 April 2020

Published: 27 April 2021

### Abstrak:

Posisi Kiai dianggap merupakan salah satu kunci penting dalam memahami struktur masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini Kiai dilihat sebagai subjek politik dari agensi dan strukturasi kekuasaan di Pandeglang. Kharisma dan ketokohan Kiai mampu membuat struktur baru dalam kekuasaan daerah. Keterlibatannya dalam urusan publik membuatnya menjadi agen baru dalam wacana isu publik. Dengan analisis yang lebih ditekankan pada aspek kultural untuk melihat fungsi sosial politik yang diperankan oleh Kiai, penelitian ini menjadi hal yang sangat menarik untuk ditinjau lebih jauh. Dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi hermeneutik, penelitian ini mengungkapkan banyak makna dalam melihat struktur kekuasaan yang ada dan memberikan pemaknaan baru dalam melihat relasi kekuasaan dalam politik lokal. Maka dari itu, penelitian ini memberikan gambaran lainnya bahwa di tengah maraknya kekuasaan politik lokal yang dipenuhi dengan oligarki, hasil riset ini menawarkan jalan baru dalam sebuah struktur kekuasaan melalui agensi yang mampu mendorong struktur kekuasaan agar membawa wacana-wacana publik ke permukaan.

### Keywords:

kiai; strukturasi; agensi; perubahan sosial

## Pendahuluan

**K**iai dengan segala eksistensi dan perannya di masyarakat telah menjadi simbol dalam agenda sosial politik. Pada kondisi masyarakat dimana ketaatan beribadah cukup tinggi dan unsur agama banyak mempengaruhi perilaku warga, Kiai mendapatkan tempat yang strategis. Terdapat hubungan simbiotik antara pemimpin (Kiai), kepercayaan (teks suci) agama, dan Formula (bentuk) magi. Apabila Kiai memperbesar fungsinya dalam jaringan sistem sosial, maka kepercayaan, aturan dan teks suci agama dapat menjadi besar. Hal ini berimbas pula pada semakin besarnya formula magi, karena dari kepercayaan dan simbol agamalah formula magic bersumber dan mendapat legitimasi (Tihami, 1992). Keberadaan Kiai bukan sekedar figur pemimpin pondok pesantren

### Korespondensi:

Departemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Pakupatan, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124.  
Email: dian.hikmawan@untirta.ac.id

atau pemimpin ritual keagamaan. Lebih dari itu Kiai mampu membentuk struktur sosial yang menempatkan dirinya pada posisi menguntungkan untuk berbagai konteks. Di Jawa Timur, Kiai tidak sekedar menjadi aktor pendulang suara pemilih pada *event* politik semisal Pilkada. Kiai justru mampu tampil sebagai kontestan dan beberapa diantaranya memenangkan pemilihan kepala daerah (Chalik, 2015). Tidak sekedar persoalan kontestasi politik, sebagai elit agama Kiai merupakan pemimpin *polymorphic*. Sosok Kiai dalam kepemimpinannya membawahi bidang agama dan sosial, maka figurnya menjembatani kondisi masyarakat dalam membangun kapital sosial yang bernilai produktif dengan tetap berani menunjukkan nilai-nilai kebenaran yang berlandaskan agama (Jannah, 2015).

Peran Kiai juga dinilai cukup dinamis. Ada periode ketika posisi Kiai begitu penting. Namun periode lainnya, peran Kiai seakan digantikan oleh aktor lainnya. Pergeseran peran Kiai setidaknya dapat dibaca pada beberapa literatur, diantaranya dari penelitian Hamid (2010) tentang proses keterpinggiran peran politik ulama di satu sisi dan dominasi kekuasaan jawara pada sisi lainnya, baik dalam peran di masyarakat, tanggung jawab, eksistensi, serta pola pikir di masyarakat. Sosok Kiai di masyarakat tentu saja memiliki makna dasar sebagai pemuka agama yang bertugas mengkaji firman-firman Tuhan dan Rasul-Nya, memberi tafsir terhadapnya, juga menyampaikannya kepada para pengikutnya. Kiai memimpin sebuah institusi pendidikan agama berbasis *boarding school* bernama pondok pesantren. Kemampuannya memahami imu-ilmu Islam, menjadikan Kiai sebagai guru agama pada struktur tinggi. Pendapatnya diperlukan tidak hanya terkait urusan privat menyangkut kepentingan pribadi (individu yang taat dan patuh pada ajaran Islam), tetapi juga menyentuh ranah publik. Nasihat dan pandangan Kiai diperlukan untuk memecah kebuntuan permasalahan yang mendera masyarakat yang tidak bisa diselesaikan melalui petunjuk konvensional. Sehingga kedudukan Kiai dapat menjadi inspirasi dan pada beberapa hal kerap menjadi pembela ummat yang tertindas yang tidak menemukan solusi dari sosok atau institusi lainnya. Keberadaan Kiai yang tidak sekedar menjadi tokoh agama, sebenarnya telah dimulai sejak masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah panjang telah membuktikan Kiai berada dalam garda depan menentang penindasan pemerintah kolonial. Peran Kiai berada pada selah dalam menyulut semangat santri-santri untuk berperang. Kiai juga turut memimpin langsung sebuah pasukan yang terlibat bentrok dengan tentara kolonial dalam melakukan pemberontakan. Tahun 1888 misalkan, pecah pemberontakan petani di Banten atau yang masyhur dan epik sebagai peristiwa “Geger Cilegon”. Diantara para pemimpin pemberontakan terdapat nama Haji Abdul Karim (Ki Agung), Kiai Haji Wasid, dan Kiai Haji Tb.Ismail (Kartodirdjo, 1984). Peran Kiai terus berlanjut pasca kemerdekaan. Mulai dari terlibat dalam parlemen guna menyusun kerangka dasar Negara, menjadi pemimpin partai politik, menempati posisi di pemerintahan dan legislatif. Di Banten sendiri, rentang waktu 1945-1950 telah

menempatkan KH.Tb. Achmad Khatib sebagai Residen Banten dan KH. Syam'un sebagai Bupati Serang (Hamid, 2011). Nama terakhir bahkan dinobatkan gelar Pahlawan oleh Pemerintah tahun 2018. Meski mengalami pasang surut pengaruh, keberadaan Kiai teruji tak lekang pada beberap rezim kekuasaan di Indonesia.

Dalam studi-studi yang ada seperti yang dilakukan oleh Kusmayadi, Agung, & Ali (2016) menerangkan banyak mengenai peranan Kiai dalam model kepemimpinan politik, penelitian ini coba menggambarkan Kiai dalam praktik politik dengan instrumen partai politik yang menjadi jalan dalam mengakumulasi kekuasaan. Sebagai sebuah konstruksi sosial, beberapa konsep Kiai yang ada sangat dimaknai dengan berbeda-beda. Pemaknaan yang berbeda disebabkan karena berbagai macam masyarakat dengan berbagai kebudayaan, di Banten khususnya di Pandeglang konsep Kiai sangat di maknai berbeda dengan di kontur-kontur masyarakat lainnya. Konsep Kiai di pandeglang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masysrkatnya. Kiai memiliki peranan penting tidak hanya dalam urusan agama melainkan dalm urusan-urusan publik dalam pemerintahan, besarnya pengaruh dan simbol seorang Kiai tidak heran jika dalam pemilihan umum daerah maupun nasional sosok Kiai mampu memobilisasi massa dalam berbagai isu (Hikmawan, Indriyany, & Mayrudin, 2019).

Peran Kiai melekat erat bersaman kehidupan masyarakat di wilayah Pandeglang. Setiap sudut desa di mayoritas wilayah Pandeglang menyertakan Pondok Pesantren sebagai institusi pendidikan bagi warga yang berada pada usia belajar. Pesantren hadir tidak hanya dalam bentuk pendidikan formal, namun juga dapat berupa institusi informal. Pondok Pesantren bisa menjelma sebagai institusi yang mentransfer nilai dan pengetahuan komplementer bagi para siswa yang sedang menempa ilmu di sekolah formal. Tidak lengkap seseorang memperoleh pendidikan tanpa pengajaran dari pesantren. Pesantren menjadi sebuah simbol bagi Kiai dimana mereka juga dipandang sebagai sebuah sosok panutan yang menjaga kesucian agama dan memiliki nilai-nilai tinggi dalam agama islam (Fadhilah, 2011). Nilai, materi ajaran, dan metode pengajaran yang otentik dari Pondok Pesantren menjadikanya berbeda dengan lembaga pendidikan formal semisal sekolah atau lembaga kursus keahlian. Sehingga para orang tua di Pandeglang tidak segan untuk memasukan anak atau saudaranya ke Pondok Pesantren sebagai upaya membentuk karakter manusia yang utuh melalui pendidikan. Di Kemudian hari, murid Pondok Pesantren (Santri) yang menyelesaikan proses pendidikan dari pesantren akan mempunyai ikatan emosional yang kuat sebagai alumni. Pada saat menjalankan kehidupan di masyarakat, alumni Pesantren akan mempunyai status sosial lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Mereka bertebaran dengan profesi dan peran yang tak jauh dari aktifitas keagamaan seperti menjadi ustadz, guru mengaji, imam masjid, serta ketua kelompok pengajian dan shalawatan. Pola hubungan antara alumni dan Kiai tetap sama seperti hal semasa menjadi Santri, yakni tidak pada posisi yang setara atau cenderung berupa *Patron-Klien*. Sehingga, Kiai dapat memperluas jaringan sosial melalui alumni. Pada sisi yang

lain, hubungan Kiai dan alumni Santri juga menjadi media yang mengokohkan dan melebarkan alumni Santri. Hubungan Kiai-Santri-Alumni mengalami soliditas dan meluas ke dalam struktur masyarakat secara lebih intensif. Hal ini semakin kuat jika para santri yang belajar di sebuah pesantren berasal dari lintas kelas sosial dan profesi yang beragam.

Masyarakat Pandeglang memiliki corak yang khas yang mempengaruhi cara hidup bermasyarakatnya, namun ke-khasan ini buakan merujuk pada pluralitas yang beragam, melainkan merujuk pada kesakralan yang terus di jaga, kesakralan tersebut terkadang menutup dirinya bagi dunia luar dan menjadikan dirinya satu-satu hal yang harus terus dijaga (Hikmawan, 2017). Dengan kehidupan ekonomi yang berbasiskan pada agraria pertanian menjadikan masyarakat pandeglang berbeda dengan daerah-daerah lain di Banten yang lebih modern dengan mengedepankan sektor jasa dalam ekonomi. Kehidupan tradisional dan masih terikat pada kearifan-kearifan lokal yang ada membuat masyarakat Pandeglang menjadikan Kiai menjadi simbol dan panutan utama dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini juga berpengaruh langsung terhadap cara berfikir dan struktur kekuasaan baik secara kultural maupun formal. Dalam beberapa kasus misalnya ada beberapa kebijakan yang di ambil oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari para tokoh Kiai. Hal ini juga menjadi semacam standar restu bagi pemerintah daerah juga dalam menjalankan roda pemerintahan. Lebih jauh model seperti ini dapat juga menjadi wacana depolitisasi terhadap model kebijakan yang ada (Hikmawan & Hidayat, 2016). Posisi-posisi demikian membuat Kiai menjadi menarik untuk di teliti khususnya dalam kasus di Pandeglang-Banten. Ke-khususan menempatkan sebuah sosok dalam kehidupan masyarakatnya membuat Kiai hampir mengambil peranan dalam seluruh hidup masyarakat. Hal tersebut yang membuat menarik memahami struktur kekuasaan Kiai dalam posisinya di dalam struktur kekuasaan di Pandeglang.

Seiring berkembangnya zaman, peran Kiai kian beragam. Keberadaannya cukup strategis, meski dihadapkan pada situasi dilematis. Sosok Kiai tetaplah menjadi penjaga tradisi keagamaan yang terlanjur merasuki nilai sosial masyarakat. Pada era kemajuan teknologi dan disrupsi interaksi sosial seperti saat ini, ketokohan Kiai mendapat tantangan berupa perlunya melakukan perubahan atau tenggelam dalam perubahan. Dhofier (1981) mengemukakan pandangannya bahwa Kiai mampu menghadirkan tradisi dan modernitas sebagai dua entitas yang berpengaruh dalam kehidupan sosial politik. Kiai nyatanya bisa melakukan berbagai terobosan-terobosan baru melalui aneka media dan cara dalam menyajikan nilai-nilai sebagai struktur kekuasaan dalam simbol kultural. Penelitian ini membahas lebih mendalam bagaimana peran dan pengaruh Kiai bisa berfungsi dan berjalan pada masyarakat Pandeglang yang tak lekang oleh masa. Kajian terhadap topik penelitian menggunakan pendekatan strukturasi sebagai alat analisa dalam menelaah peran dan pengaruh Kiai tidak hanya sekedar guru agama dan pemimpin Pondok Pesantren.

## Strukturasi Politik dalam sebuah Kajian Teoritik

Memahami Kiai dalam sebuah struktur kekuasaan sangatlah tidak mudah, apalagi Kiai menjadi sebuah simbol kharismatik yang dianggap sebagai panutan karena pilihannya dalam melepas segala urusan dunia dan meng-identikan diri dengan kehidupan yang paripurna. Dalam penelitian ini guna mengungkap dan melihat dinamika kekuasaan dan bentuk relasi kuasa yang dalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini di gunakan sebagai sebuah analisa mendalam dan pemaknaan lebih dalam dari sebuah pola relasi kuasa yang ada. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti melihat segala kemungkinan yang ada dan variabel yang dapat mempengaruhi pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti apa yang menjadi pandangan Adian (2010) bahwa fenomenologi tidak hanya menangkap apa yang coba di jelaskan dalam realitas mengenai fenomena yang di teliti, namun pada dasarnya memaknai akan sebuah fenomena yang dalam realitas atau fenomena yang nampak mungkin berlainan dengan makna sesungguhnya. Makna menjadi pokok dalam pendekatan ini, Creswell (2014) memandang bahwa fenomenologi memiliki ketetapan dalam sebuah metode, fenomenologi memungkinkan mendapatkan pemahaman dan pemaknaan yang komperhensif karena memungkinkan memasukan banyak variabel yang nampak dalam kesadaran dan reduksi terhadap data dilakuakn setelah memahami keterkaitan akan berbagai macam variabel yang berpengaruh terhadap penelitian (Hikmawan, 2020).

Padilla-Díaz (2015) menjelaskan setidaknya fenomenologi dibedakan menjadi tiga macam pendekatan, pertama fenomenologi hermenetik, pendekatan ini memungkinkan terhadap pengalaman kesadaran akan fenomena yang perlu interpretasi terhadap fenomena tersebut, kedua fenomenologi *eidetik* atau transendental; pendekatan ini memungkinkan terhadap analisa mengenai esensi-esensi dari pengalaman individual dengan semacam analisa terhadap kesadaran yang transenden. Yang ketiga merupakan *ecological phenomenology* atau fenomenologi konstitusional; pendekatan ini memungkinkan bagi peneliti memahami entitas-entitas kesadaran yang ada dalam kedirian atau *selfness* dan mengangkat nya menjadi kesadaran yang universal. Pendekatan ini banyak di gunakan dalam studi-studi lingkungan dalam memahami relasi aktifitas manusia dengan alam.

Dalam penelitian kali ini, fenomenologi *hermeneutik* dianggap sesuai dalam memahami strukturasi dan kekuasaan. Setidaknya jika kita ingin mengulas stukturasi dan agensi maka kita harus membahas Giddens yang banyak mengulas mengenai bagaimana relasi kuasa bekerja dalam strukturasi dan agensi (Giddens, 1998). Dalam pemahaman Giddens dalam menjelaskan strukturasi setidaknya strukturasi di pahami sebagai sebuah keadaan sosial yang menempatkan masyarakat pada sebuah kekangan (*constraint*) namun juga di sisi lain selalu mengekang (*constraining*) dan membebaskan (*enabling*). Dalam situasi seperti demikian, struktur dan sistem sosial yang ada selalu ber-relasi satu sama lain dan membentuk aktifitas-aktifitasn antara agensi dan

struktur kekuasaan yang ada. Kiai dalam hal ini menjadi sebuah aktifitas agensi yang menarik dalam sebuah struktur kekuasaan. Setiap aktifitas dari Kiai sebagai agensi justru memperlihatkan secara jelas dalam sebuah fenomena struktur kekuasaan yang ada di Pandeglang.

Dalam hal demikian Kiai dan strukturasi kekuasaan menjadi sebuah penelitian yang penting untuk dilakukan karena dalam skala yang lebih besar penelitian ini dapat juga dipakai dalam menggambarkan situasi Indonesia dengan lahirnya populisme agama hari-hari ini. Penelitian ini juga membuka wacana baru dalam memahami Kiai tidak hanya dalam bentuk pergulatan politik lokal yang mengambil tiga peranan penting terjadinya kekuasaan lokal yaitu; kekuasaan dalam sumberdaya alam yang membuatnya mampu mempengaruhi kebijakan dalam politik lokal seperti dalam local strongman atau transformasinya dalam Local Bossism (Migdal, 1988; Sidel, 2005). Namun dalam lebih jauh melihat Kiai sebagai bentuk model kekuasaan lain sebagai agensi dalam struktur kekuasaan sosial yang ada dalam model (Giddens, 1998). Penelitian lain yang mampu memetakan peranan Kiai di Banten salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2010) yang memetakan bagaimana memahami posisi atau struktur Kiai di Banten memiliki banyak peranan sosial. Peranan-peranan ini di dapatkan dalam berbagai hal mulai dari posisinya baik secara historitas Banten yang meng-kultuskan Kiai sebagai pedoman hidup maupun peranannya yang berpengaruh dalam tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat Banten. Sebenarnya dalam kategori lain dalam tradisi masyarakat Banten secara keseluruhan, ada dua tradisi ketokohan yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat Banten khususnya pandeglang yaitu Kiai dan Jawara. Kiai adalah salah satu tokoh baik dalam historitas maupun praktis dalam tradisi keseharian masyarakat Pandeglang menjadi sosok panutan yang memiliki kharisma yang baik dan menjadi panutan dalam cara hidup. Dalam sebuah agensi model Giddens (1998), Kiai dalam praktiknya tidak hanya sebagai simbol yang pasif dan hanya menjadi role model yang di jaga, namun dalam praktik nya tokoh kiai khususnya Abuya Dimiyati menjadi sosok Kiai yang mampu mentransformasikan dirinya menjadi sebuah agen sosial yang masuk dalam hal-hal penting dalam urusan publik. Salah satu contoh dalam beberapa kasus masalah korporasi yang mencoba mengeksplorasi sumberdaya daerah Hikmawan et al. (2019), posisi Kiai sebagai agensi mampu menggerakkan masyarakat untuk melawan semua wacana korporasi, bahkan dalam gerakan tersebut Kiai sebagai seorang agensi mampu mempengaruhi struktur formal seperti pemerintah lokal juga penguasa-penguasa sumber daya daerah hanya dengan kharismanya dalam memobilisasi gerakan melalui ke tokohnya. Hal demikianlah yang menjadi menarik dalam mendiskusikan Kiai di pandeglang dengan melihat karakteristik dari strukturasi dan agensi model Giddens.

### **Kiai dalam Strukturasi**

Beberapa entitas masyarakat di Indonesia memiliki konstruksi sosial tertentu yang melibatkan sosok Kiai. Sebagai wilayah memiliki persamaan, diantaranya

menempatkan Kiai sebagai seorang cerdas pandai pada bidang ilmu agama Islam. Kiai merupakan tokoh panutan yang harus dihormati, bukan hanya oleh muridnya (santri) namun juga oleh masyarakat. Penelitian Fadhillah (2011) menyebutkan bahwa Kiai merupakan pemimpin karismatik dalam bidang agama, dia fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran pengikut-pengikutnya. Sifat khas seorang Kiai adalah terus terang, berani dan blak-blakan dalam bersikap dan bahkan sebagai seorang ahli dia jauh lebih unggul dari pada ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip ijtihad (mengenali ajaran-ajaran Islam secara logis). Apa yang menjadi temuan selaras dengan penelitian Dhofier (1981) yang melihat Kiai merupakan gelar kehormatan bagi sesuatu yang dianggap keramat. Gelar Kiai juga gelar kehormatan untuk orang yang sudah tua, serta gelar untuk seorang yang ahli agama Islam memiliki pesantren dan mengajar kitab klasik. Kedudukan Kiai seperti disampaikan di atas bisa ditemukan di beberapa wilayah yang memiliki tradisi pendidikan pesantren yang masih kental seperti wilayah “Tapal Kuda” di Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara Barat, sebagian wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perbedaan posisi Kiai diantara wilayah-wilayah tersebut terletak pada derajat pengaruh dan cara menjalankan fungsi lain selain sebagai tokoh agama dalam dinamika sosial politik masyarakat. Beberapa penelitian mampu menuliskan peran Kiai sebagai broker politik, vote getter dalam gelaran Pemilu, bahkan sebagai aktor politik itu sendiri.

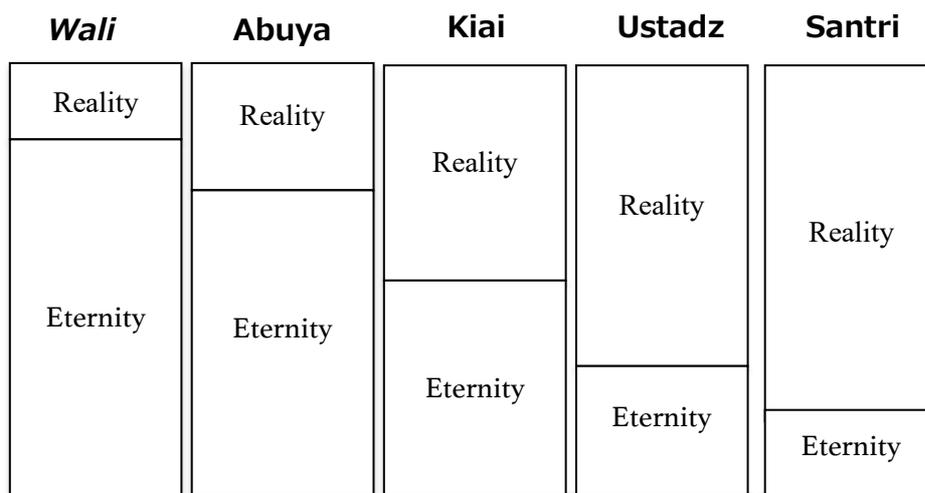
Kiai juga sangat erat kaitannya dengan politik praktis dimana daya tarik ketokohan dari seorang Kiai mampu memobilisasi massa dalam penggalangan suara (Abdussalam, 2015). Hal demikian membuat Kiai di posisikan menjadi seseorang yang sakral dimana restu Kiai bagi calon-calon kepala daerah menjadi sesuatu yang harus di dapatkan demi menggalang dukungan massa di daerahnya (Abdussalam, 2015). Dalam strukturnya Kiai mampu mem-produksi dan reproduksi kekuasaan dalam struktur sosial masyarakatnya, hal ini juga menyebabkan Kiai dimaknai mampu menjaga dan mengontrol sebuah kekuasaan dimana dalam kekuasaannya Kiai juga mampu mengatur sebuah wacana dalam keberlangsungan struktur kekuasaan tersebut (Giddens, 1979).

Kedudukan Kiai dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang tidak jauh berbeda dengan beberapa wilayah tersebut di atas. Pengaruh kultur agraris tradisional yang mewarnai kehidupan mayoritas masyarakat Pandeglang memberikan pemaknaan dan nilai-nilai penghargaan kepada Kiai yang lebih tinggi, ciri tradisional agraris masyarakat Pandeglang ini berkontribusi besar terhadap terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal dibandingkan dengan wilayah lain di Banten yang terlanjur dihinggap modernitas yang meletakkan sendi kehidupannya berpijak kepada nilai-nilai utilitarian dan cenderung pragmatis. Bagi masyarakat Pandeglang Kiai memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar sekelompok orang yang dianggap memiliki wawasan keilmuan ajaran Islam saja. Selain Kiai ada juga aktor informal lain yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Pandeglang yakni Jawara. Kiai dan Jawara memiliki relasi secara historis

dan faktual dalam membangun pengaruhnya di Pandeglang. Namun pada penelitian ini akan fokus membahas peranan Kiai dalam stukturasi sosial.

Kiai di wilayah Pandeglang masuk dalam hierarki pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren. Struktur hierarki tersebut dari tingkatan tertinggi yakni Wali, Abuya, Kiai, Ustadz, dan Santri. Hierarki pendidikan berdasarkan tingkat pemahaman terhadap ilmu agama, kesalehan, dan kemampuan mengelola hubungan patron-klien secara berjenjang. Penelitian oleh Muslim, Kolopaking, Dharmawan, & Soetarto (2015) memberikan informasi bahwa faktor kemampuan menjalankan dikotomi urusan duniawi dan agama (akhirat) menentukan seseorang masuk dalam tingkatan hierarki dimaksud. Artinya seorang wali sebagai pucuk hierarki akan memberikan porsi sangat kecil terhadap urusan dunia ketimbang urusan agama dalam aktivitas sehari-hari. Begitu juga sebaliknya yang terjadi pada diri santri yang lebih memberikan bagian waktu lebih besar untuk urusan dunia dibanding urusan akhirat. Ilustrasi gambar di bawah akan menjelaskan hierarki dalam struktur pendidikan di Pesantren berdasarkan kemampuan menjalankan dikotomi urusan dunia dan agama :

Gambar 1. Struktur Hirarkis Pesantren



Sumber: diolah oleh Peneliti

Struktur hierarki pendidikan pada lingkungan Pesantren di wilayah Pandeglang ini banyak didominasi oleh Pesantren-Pesantren tradisional Salafiyah. Struktur hierarki terbuka untuk posisi santri hingga Kiai. Setiap individu dapat menjadi santri, Ustadz, hingga Kiai secara bertahap dengan menjalankan aktivitas dan ritual yang telah ditentukan. Untuk bisa naik pada jenjang berikutnya, seseorang juga harus menjalankan relasi patron klien. Mirip seperti konstruksi sel-sel sosial. Seorang santri dapat menjadi Ustadz apabila sudah berada pada posisi senior (berdasarkan kemampuan memahami ilmu agama dan memiliki pengamalan waktu belajar yang lebih lama dibanding santri lainnya). Ustadz memiliki santri sebagai muridnya. Kedudukan Ustadz menjadi tenaga pengajar teknis pada kelompok-kelompok

pembelajaran informal di Pesantren. Seorang Ustadz tetap harus belajar memperdalam ilmu agama kepada Kiai.

Ustadz akan naik tingkatan menjadi Kiai apabila santri-santrinya sudah ada yang menjadi Ustadz. Transformasi Ustadz menjadi Kiai harus menyentuh kepada seseorang yang berada pada posisi Ustadz senior berdasarkan kemampuan pemahaman agama dan pengalaman waktu. Pola seperti ini akan terus berlanjut hingga tingkatan tertinggi. Seorang Wali memiliki murid-murid yakni Abuya. Seorang Abuya memiliki murid-murid yakni kelompok Kiai. Seorang Kiai memiliki murid-murid yaitu kelompok Ustadz, serta seorang Ustadz yang memiliki beberapa santri. Akan tetapi, hierarki struktur seperti ini tertutup untuk posisi Abuya dan Wali. Tidak semua orang berkesempatan menjadi Abuya dan Wali. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan pemilik dan pendiri sebuah Pesantren yang dapat menjadi Abuya. Bahkan sebutan Wali nyaris tidak diberikan kepada mereka yang masih hidup. Hanya ulama-ulama besar yang telah wafat yang mendapat predikat Wali dari masyarakat setempat.

Kiai di wilayah Pandeglang memiliki kedudukan dasar sebagai tokoh agama/guru yang memiliki murid-murid beberapa orang Ustadz. Seseorang Kiai harus membangun karir dari bawah sebagai seorang santri terlepas dia memiliki garis keturunan dari seorang Kiai besar atau tidak. Seiring berkembangnya waktu, dinamika sosial politik di Pandeglang telah menempatkan Kiai bukan sekedar guru ilmu agama dan pengasuh Ustadz dan Santri di Pondok Pesantren. Kiai memiliki peran lain dan pengaruh di masyarakat. Penelitian Tihami (1992) mengenai Kiai dan Jawara di Banten memberikan hasil studi bahwa pengetahuan agama, kekuatan magi, dan pola kepemimpinan telah membentuk pengaruh yang besar terhadap Kiai dan Jawara. Pengaruh Kiai di masyarakat sudah dimulai pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan. Kiai mampu tampil sebagai ulama dan umaro di tengah Masyarakat. Sejarah mencatat beberapa Kiai besar seperti KH. Tubagus Ahmad Chatib mampu menjadi residen pertama di wilayah Keresidenan Banten. Nama lainnya yakni Brigjen KH. Sjam'un sebagai pimpinan pasukan pejuang kemerdekaan, KH. Tb. Abdoel Halim sebagai Bupati Pandeglang, KH. Abdul Fatah Hasan sebagai anggota BPUPKI. Tidak hanya Pemimpin pada level tertinggi pemerintahan di daerah, jabatan-jabatan dibawahnya pun seperti para wedana, camat dan kepala kesatuan kepolisian, banyak diisi oleh kelompok Kiai (Suharto, 2001). Dalam penelitian Suharto (2001), tampilnya kelompok ulama (direpresentasikan oleh sosok Kiai) dalam politik lokal Banten merupakan usaha yang telah lama mereka perjuangkan setelah kedudukannya dimusnahkan oleh kolonialisme Belanda. Masyarakat menghendaki tampilnya para ulama sebagai amirul mukminin, sehingga adanya kekosongan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan merupakan kesempatan paling baik bagi kaum ulama untuk tampil kembali sebagai umaro.

Keterpilihan kelompok ulama sebagai pemimpin pemerintahan daerah di Banten merupakan dampak dari kemampuannya membela kepentingan rakyat sedari

era kolonialisme. Kiai menjadi pemimpin unit pasukan kecil yang berisi para santri yang siap berperang melawan kesewenangan pemerintah kolonialisme. Lingkungan pesantren tidak sekedar sebagai sarana pendidikan informal, namun menjadi pusat dakwah, arena konsolidasi ulama jawara, dan lembaga pembangun kepedulian bagi rakyat jelata melalui bantuan moral dan materi (bahan pangan). Kiai sebagai pimpinan pesantren tentu saja mendapat efek positif dari keberadaan pesantren di tengah pemukiman warga (Hikmawan et al., 2019).

Pemerintah Kolonial menyadari betul peran strategis Kiai di masyarakat. Maka mereka membuat siasat untuk memisahkan peran Kiai dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Kolonial mulai memperkenalkan sistem birokrasi pemerintahan modern. Pengaruh dan kewenangan unit birokrasi di perbesar hingga mampu mengontrol kehidupan masyarakat seperti kebijakan bidang perkebunan, penerapan hukum negara kolonial dalam hubungan sipil masyarakat, penarikan pajak, kontrol perdagangan, dan lainnya. Pemerintah Kolonial mengirimkan para tokoh pamong praja dari pusat untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan termasuk pemimpinya. Norma dan nilai agama berusaha dipisahkan dari hubungan horizontal di masyarakat. Pada titik inilah terjadi degradasi peranan Kiai dalam kehidupan masyarakat di Banten yang oleh Suharto (2001) disebabkan karena upaya pemerintah kolonial yang dilakukan secara gradual, selain beberapa peristiwa yang menunjukkan adanya kebijakan represif terhadap Kiai yang lantang melakukan perlawanan. Namun Kiai tetap memiliki tempat tersendiri di dalam pandangan masyarakat. Aktivitasnya utamanya sebagai guru ilmu agama dan pemimpin Pesantren tetap berjalan. Pesantren tetap menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan.

### ***Abuya: Historisitas dan Lingkaran Kekuasaan***

Masa keemasan Kiai menjalankan perannya sebagai umaro di wilayah Banten pada era awal kemerdekaan terhenti ketika spektrum politik nasional berada dalam kendali kepemimpinan Presiden Soeharto. Kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila, penyederhaan kelompok politik, hegemoni kekuatan ABRI-Birokrasi-Golkar, dan adanya kebijakan negara yang cenderung Islamophobia telah berdampak pada perubahan peran Kiai di Banten, tak terkecuali wilayah Pandeglang. Kiai dibentuk oleh sistem politik menjadi agen negara untuk menyukseskan program-program pemerintah. Bahkan untuk program yang menyisakan kontroversi bagi kelompok agamawan seperti program Keluarga Berencana, Program penggunaan alat kontrasepsi, atau pelarangan simbol agama di ruang publik, Kiai tetap harus mengatakan kebaikan kepada umat/masyarakat. Kiai menjadi alat legitimasi atas keputusan-keputusan pemerintah yang bertujuan memperkuat power rezim yang berkuasa. Kiai didapuk menjadi simpul-simpul pengumpul suara bagi kemenangan Golkar di setiap Pemilu era Orde Baru (Hamid, 2011). Cara yang dilakukan pemerintah untuk menggaet Kiai berupa tindakan represif atau kooperatif. Pemerintah menggunakan instrumen bantuan pendanaan bagi pondok Pesantren untuk

mengendalikan dan mengontrol pengaruh Kiai. Pemerintah akan melakukan penangkapan dan penghilangan paksa tanpa proses peradilan terhadap Kiai yang tidak mengikuti instruksi rezim berkuasa. Stereotip sebagai antek PKI atau pergerakan mendirikan Negara Islam Indonesia menjadi bumbu dalam tindakan represif negara terhadap Kiai di Banten.

Abuya Dimiyati merupakan sosok yang sangat dimulyakan oleh masyarakat pandeglang. Sebagai seorang Kiai yang di hormati dan menjadi panutan. Sosok Abuya Dimiyati merupakan sosok yang tidak lepas dari pesona dan kharisma yang sangat berpengaruh di era orde baru. Sebagai seorang tokoh pada saat itu beliau banyak mendapatkan tekanan atau repesifitas dari pemerintahan orde baru. Dengan idelismenya yang kuat Abuya Dimiyati mencoba berusaha untuk tidak sepakat dengan segala bentuk represif dari rezim orde baru. Sebagai bentuk perlawanannya beliau juga mengalami berbagai bentuk tindakan represif dari rezim orde baru mulai dari penangkapan dan penahanan sampai dengan labelling sebagai seorang PKI. Dari sinilah beliau mendapatkan dukungan masyarakat dan mampu memobilisasi masa hingga runtuhnya orde baru. Pasca runtuhnya Orde Baru, dan Indonesia dilanda dengan gelombang demokrasi dengan otonomi daerahnya. Pemilihan kepala daerah menjadi sebuah rutinitas dalam demokrasi prosedural tersebut. Dengan ketokohan dan pengaruhnya tentu saja Abuya Dimiyati banyak menarik perhatian para calon bupati (Hamid, 2010). Ritualitas terhadap dukungan seorang Abuya Dimiyati menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun wacana kekuasaan, walau dalam praktiknya sikap Abuya Dimiyati terbuka bagi siapapun beliau pada praktiknya tidak mengusung atau mengidentikan dirinya dengan calon manapun namun beliau mencoba terbuka bagi siapapun.

Kiai di wilayah Pandeglang mengalami pergeseran. Era reformasi memberikan ruang terbuka bagi Kiai untuk menjalankan peran strategis tanpa kehilangan otonominya di masyarakat. Sayangnya Kiai bukanlah satu-satunya aktor yang memiliki kesempatan itu. Ada aktor politisi, pengusaha, dan kelompok jawara yang berada pada masa yang sama berlomba merebut pengaruh di masyarakat. Penelitian Hamid (2010) mengenai politik lokal di Banten memperlihatkan adalah terjadinya pergeseran peran Kiai dari *cultural broker* menjadi *political broker*. Pada sisi lain peran politik jawara semakin menguat yang sebagian besar difasilitasi oleh dinamika sistem politik yang menguntungkan kedudukannya di tengah kondisi transisi demokrasi dan situasi krisis perekonomian warga. Kelompok Kiai terjebak dalam kompetisi dan relasi melanggengkan kekuasaan politik lokal bersama kelompok Jawara.

Kiai tidak mempunyai cukup sumberdaya untuk membangun pengaruh di masyarakat secara otonom dalam tatanan demokrasi prosedural yang menitikberatkan pada popularitas dan kepemilikan capital. Sementara, Kiai juga masih dihadapkan pada norma untuk istiqomah memelihara gerakan moral dan dakwah berbasis ilmu agama (Hannan, 2018). Sehingga pilihan untuk menjadi aktor dalam konstruksi politik praktis atau terlibat langsung dalam proses pengambilan

kebijakan begitu dilematis. Kegamangan kelompok Kiai dalam transformasi sistem politik di Indonesia menyebabkan kedudukannya sebagai subordinat dari kelompok-kelompok kepentingan dalam *event* Pemilu atau keperluan dukungan massa. Meski demikian, pengaruh Kiai tidak lekang ditelan perubahan zaman dan dinamika sosial politik (Jannah, 2015). Karena pengaruhnya yang masih cukup besar, maka beberapa pihak menggandeng Kiai sebagai *vote getter* dalam membangun dukungan politik.

Sosok Kharisma dari Abuya Dimiyati juga dirasa mampu bagi Achmad Dimiyati Natakusumah menjadi Bupati terpilih dua periode, kebijakan yang cenderung menjaga terhadap peranan agama dalam kehidupan sosial masyarakat pandeglang membuatnya menjadikan kekuasaan dalam lingkaran politiknya. Abuya Dimiyati dan para Kiai di Pandeglang juga mendapatkan banyak perhatian dari sisi kebijakan, mulai dari memfasilitasi transportasi pengajian bagi masyarakat sampai dengan kebijakan afirmatif bagi seremonial atau kearifan lokal yang di himbau oleh para Kiai. Hal ini membuat dalam struktur kekuasaan terbentuknya struktur kekuasaan karena relasi dari variabel Kiai sebagai sosok panutan dan kepentingan dalam politik praktis.

Sepeninggal Abuya Dimiyati, tidak membuat peran Kiai dan pengaruhnya terhadap struktur kekuasaan dan kebijakan menghilang atau tersisihkan. Putra dari Abuya Dimiyati yaitu Ahmad Muhtadi Dimiyati menjadi sosok baru dan pengganti beliau. Abuya Muhtadi merupakan salah satu anak dari Abuya Dimiyati yang memiliki banyak santri dan pengikut yang membuat beliau dalam waktu singkat mengambil peranan ayahnya, bahkan akhir-akhir ini dalam polarisasi politik nasional Abuya Muhtadi memiliki pengaruh dan peranannya karena beliau mampu memiliki relasi langsung dengan tokoh Kiai besar nasional yang menjadi Wakil Presiden sekarang Kiai Ma'ruf Amin.

Ketokohan Abuya Muhtadi juga dapat dilihat dalam sebuah gerakan dalam menanggapi isu lingkungan di Pandeglang dimana pada saat ada sebuah industri yang mencoba mengeksplorasi pembangunan industri air minum berhasil di hentikan oleh gelombang besar yang menentang pembangunan tersebut. Dengan menggerakkan para santri dan tokoh-tokoh agama setempat Abuya Muhtadi berhasil memobilisasi masa dalam melakukan perlawanan terhadap pembangunan industri tersebut (Hikmawan et al., 2019). Di era populisme agama dan seiring naiknya sentimen-sentimen agama dalam kehidupan sehari-hari dalam dimensi nasional, hal tersebut juga mempengaruhi peranan seorang Abuya Muhtadi dalam struktur kekuasaannya. Abuya Muhtadi menjadi seorang tokoh yang selalu ada dalam berbagai wacana publik dari pemerintah daerah Pandeglang, Bupati pandeglang sekarang Irna Narulita yang merupakan Istri dari mantan Bupati pandeglang dua periode sebelumnya Achmad Dimiyati Natakusumah sangat bisa membaca bahwa sosok dari Abuya Muhtadi menjadi sentrum bagi berjalannya kekuasaan di Pandeglang. Restu dan ijin dari seorang tokoh Abuya Muhtadi menjadi sebuah indikator penting dalam menjaga stabilitas politik daerah.

Dengan struktur kekuasaan yang melibatkan seorang tokoh agama besar, hal tersebut juga membuat kebijakan-kebijakan yang ada di daerah Pandeglang menjadi kebijakan populis terhadap simbol-simbol agama. Di satu sisi model seperti ini mampu menguatkan struktur kekuasaannya karena masyarakat mendapat pesan bahwa kepemimpinan sekrang sangat peduli dan erat kaitannya dengan keagamaan mengingat daerah Pandeglang menjadi salah satu daerah santri dan pesantren yang besar di Indonesia, namun bila kita telisik di sisi lainnya berbagai macam seremonial dan simbol yang dimunculkan dalam ruang publik namun di sisi lainnya menutupi tugas-tugas lainnya di tengah label kabupaten tertinggal yang memiliki setumpuk masalah dalam sisi kemiskinan, pengangguran dan pembangunan daerah. Dalam situasi politik klientalistik yang di bangun Achmad Dimiyati Natakusumah tersebut, hal demikian setidaknya mengamankan posisi-posisi dinastinya dalam politik lokal setidaknya dalam pemilihan legislatif 2019 model klientelistik ini meloloskan Achmad Dimiyati Natakusumah dan anaknya Rizki Aulia Rahman Natakusumah menjadi anggota DPR RI dengan suara terbanyak di Dapil dan partainya masing-masing (Kompas.com-14/05/2019).

### Kiai Sebagai Agen Strukturasi Sosial

Keberadaan Kiai di Kabupaten Pandeglang sangat vital. Kiai adalah problem solver atas berbagai permasalahan yang menimpa rakyat. Pendekatan penyelesaian masalah selalu merujuk pada ketentuan agama yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berbagai persoalan dari mulai urusan privat dalam lingkup kecil seperti keluarga hingga urusan publik skala nasional, Kiai selalu memberikan pertimbangan solutif (Sadi, 2016). Warga menyebutnya dengan istilah mencari Barokah atau Nyareat kepada Kiai setiap kali terbentur urusan dunia yang tidak mampu diselesaikan lewat prosedur normal. Pengaruh Kiai di Pandeglang yang sedemikian rupa tidak tercipta melalui proses yang sederhana. Kedudukan Kiai tidak sekedar pemuka agama atau pemimpin pesantren lalu secara otomatis memiliki pengaruh besar di masyarakat (Achidsti, 2014). Diperlukan penjelasan akademik untuk bisa menggambarkan peran Kiai dalam relasi sosial dan relasi kekuasaan yang menjadi ciri otentik di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Seperti telah disampaikan di awal, masyarakat Pandeglang berada pada tatanan agraris tradisional. Bukan sekedar soal pertanian sebagai pondasi perekonomian warga, namun terkait dengan interaksi sosial, cara pandang, dan persepsi politik masyarakatnya terhadap suatu hal. Masyarakat agraris tradisional memiliki pola hubungan sosial yang berbeda dengan masyarakat di wilayah industri modern atau perdagangan jasa (Achidsti, 2014). Pada masyarakat agraris tradisional, ikatan komunitas dalam lingkup desa masih sangat erat. Ikatan ini akan terlihat dari empati dan perasaan sepenanggungan antar warga. Satu orang warga yang mengalami kesulitan, akan dibantu oleh banyak warga untuk memberikan pertolongan. Nilai toleransi, gotong royong, dan tolong-menolong menjadi modal

dalam membangun kebersamaan di lingkup kehidupan masyarakat desa. Kehidupan komunal pedesaan akan menitikberatkan pada banyak persamaan dibanding perbedaan (Abdurrahman, 2012).

Persamaan pada aspek mata pencaharian, aktivitas ekonomi, pendidikan, kehidupan beragama, hingga hal-hal di wilayah privat seperti kepemilikan properti selalu diupayakan untuk dilakukan secara bersama. Seseorang akan menjadi terasing manakala memiliki satu perbedaan dalam aspek tertentu. Ciri berikutnya dari kehidupan masyarakat agraris tradisional ialah ikatan terhadap kultur dan wilayahnya. Budaya yang terpelihara oleh masyarakat setempat akan tetap dipertahankan sebagai bagian dari norma dan identitas diri. Kultur masyarakat akan melibatkan aspek kewilayahan. Tempat berpijak, beraktivitas, mendapatkan manfaat alam, dan ritual peribadatan adalah salah-satu instrumen menjalan kultur yang diakui. Sehingga masyarakat agraris tradisional tidak akan meninggalkan desa tempat tinggalnya terlalu jauh hingga lintas kabupaten/kota, kecuali telah mendapat pengaruh nilai modernitas.

Masyarakat agraris tradisional begitu religius. Pemeliharaan kultur akan berjalan beriringan dengan pelaksanaan kegiatan religi. Agama Islam yang berkembang pada masyarakat Pandeglang, telah berdampak pada kehidupan sosial. Pemahaman terhadap nilai agama bersinergi dengan pemelihara kultur dan pola kehidupan masyarakat komunal pedesaan. Aktivitas sosial keseharian warga Pandeglang sulit dilepaskan dari nilai religius. Dengan demikian maka sosok Kiai akan mendapat tempat istimewa di mata masyarakat. Nasihat dan tindakan Kiai tidak sekedar petuah tokoh agama, namun menjadi dasar terpeliharanya kultur dan karakteristik masyarakat komunal (Jannah, 2015). Berdasarkan tuntutan agama, Kiai akan menganjurkan kepada warga untuk rajin beribadha hubungan dengan Tuhan (vertikal) dan ibadah hubungan antar umat (horizontal). Ibadah hubungan horizontal dalam dilakukan seperti bekerja keras menafkahi keluarga, memelihara kelestarian lingkungan, melakukan aktivitas ekonomi seperti dicontohkan nabi berupa berdagang dan bertani, menjaga ukhuwah antar sesama muslim, saling tolong menolong, dan lainnya.

Dalam berbagai posisi tersebut, dalam kasus Kiai di Pandeglang Abuya Muhtadi saat ini memiliki pengaruh dan menjadi subjek politik yang penting dalam membangun struktur kekuasaan yang ada. Mengingat pentingnya peran dan pengaruhnya dalam kondisi-kondisi kebijakan di Pandeglang, yang menjadi tantangan terbear adalah membangun struktur agensi sosial yang mampu keluar dari bangunan simbol-simbol yang coba dibangun oleh model klientalistik Natakusumah, bagaimana transformasi agen dalam struktur tersebut harus mampu juga membawa wacana-wacana baik dalam permasalahan publik seperti kesejahteraan, sosial, pembangunan daerah, pengangguran dan lain nya (Anthony Giddens, 1986). Agenda tersebut menjadi sangat penting agar subjek politik yang ada sekarang dalam ke tokohnya sebgai Kiai mampu keluar dari dari ruang-ruang semu dan membentuk

sebuah diskursus baru mengenai agensi yang membentuk agensi dan struktur kekuasaan yang peka pada kebutuhan publik.

Kemampuan dalam membangun struktur yang penuh dengan diskursus publik tidaklah semudah yang dibayangkan, dalam praktiknya agen dan struktur selalu ada dalam sebuah relasi yang timbal balik (Bagguley, 2003). Kemampuan agen membuat struktur yang dapat mempengaruhi situasi meskipun agen tersebut tidak berada dalam lingkup formal kacamata kenegaraan. Model agens dan struktur seperti ini mampu keluar daam urusan-urusan birokratis dan mendorong terciptanya perubahan yang lebih baik dalam melihat agenda-agenda publik (Bagguley, 2003). Modal awal seorang agen dalam mebentuk struktur kekuasaannya setidaknya harus diiringi dengan modal sosial. Dari apa yang terjadi dengan peran seorang Abuya Muhtadi menempatkan beliau dalam posisi-posisi modal sosial yang kuat. Dukungan dari masyarakat membentuk strukturnya sendiri bahkan diluar dari sistem kekuasaan negara.

**Tabel 1. Model Pembentukan Realasi Agens dan Struktur Kiai di Pandeglang**

Interaksi Relasional	Klientalistik	Strukturasi
Kekuasaan	Model kekuasaan yang dibanun atas dasar pertukaran (Migdal, Sidel)	Dibangun melalui relasi agen dalam struktur komunikasi dan kapasitasnya sebagai subjek.
Moralitas	Hubungan timbal balik bukan atas dasar keluhuran nilai yang dibangun	Disandarkan pada suatu nilai luhur bersama yang menjadi cita-cita bersama
Agensi/Subjek Politik	Tdak ada agensi atau subjek politik, yang tersisa hanya interest dan kapasitas sumberdaya yang dapat di pertukarkan.	Sturtur kekuasaan yang ada membentuk Subjek politik yang memiliki pengaruh dalam sebuah jaringan struktur yang sudah dibangun atas dasar nilai-nilai yang luhur dan cita-cita bersama dalam mencapai sesuatu.

*Sumber:* diolah oleh Peneliti

Dalam kondisi tersebutlah sebuah transformasi agen dalam peran nya menjadi subjek politik mampu mengubah dan mempengaruhi struktur, karena struktur yang terbentuk merupakan jaringan dari segala bentuk modalitas dan relasional yang telah di bangun di atas nilai-nilai yang luhur. Terlebih kekuasaan tersebut juga di dapatkan atas dasar kepercayaan dan kesadaran bukan hanya sekedar pertukaran kepentingan seperti apa yang terjadi dalam model klientalistik. Model seperti ini merupakan

bangunan yang ideal dimana struktur yang terbangun tidak terikat dalam klientalistik dan mengekang aktifitas agensi dalam mewacanakan urusan-urusan publik yang

## Penutup

Kiai dalam penelitian kali ini menjadi sebuah agensi dalam struktur sosial dan kekuasaan yang ada. Kiai di tempatkan menjadi subjek politik dalam berlangsungnya diskursus kekuasaan dalam struktur sosial masyarakat (Clark, Modgil, & Modgil, 1990). Tindakan dan wejangan Kiai kepada santri dan masyarakat setempat sesungguhnya adalah bagian dari melakukan syiar. Kiai sadar bahwa umat harus diarahkan pada kebaikan sesuai perintah dan menghindari larangan agama. Kiai dengan rutinitasnya yang terpola memberikan ceramah dan contoh perbuatan yang baik berdasarkan norma agama. Apa yang dilakukan Kiai tidak hanya untuk menuntaskan tugas dan kewajiban penyambung ajaran Nabi dan Wali, akan tetapi terdapat dampak bersifat unintended consequences (konsekuensi yang tidak disengaja). Dampak ini terbentuk dari penetapan kebijakan Kiai untuk konsisten berada di jalan amal ma'ruf nahi mungkar mengarahkan masyarakat menjalankan aktivitasnya. Apa yang disampaikan Kiai akan mempengaruhi tindakan masyarakat di kemudian hari.

Ucapan Kiai beserta tindakannya bukanlah sebuah kekangan (constraint). Kiai tidak pernah memaksakan suatu anjuran kepada santri dan atau masyarakat. Namun apa yang dilakukan Kiai dapat dianalisa sebagai suatu yang selalu mengekang (constraining) dan membebaskan (enabling) seperti apa yang diungkap (Anthony Giddens, 1979). Kiai menggunakan dalil agama sebagai instrumen untuk membuat santri dan masyarakat berada dalam kondisi harus mengikuti apa yang disampaikannya. Struktur diibaratkan sebagai suatu arus perilaku yang terus menerus seperti kognisi, mendukung atau bahkan mematahkan selama akal masih dianugerahkan padanya (A Giddens, 1998). Pola hubungan Kiai dengan santi-warga sekitar yang hierarki terus terbangun berulang dan terpelihara. Kiai menjadi agen yang mereproduksi aktivitas untuk mengekspresikan dirinya sebagai aktor/pelaku. Perilaku Kiai akan dipahami sebagai perintah untuk melakukan tindakan yang dianggap membawa pada kebenaran dan kondisi ideal. Relasi seperti ini meliputi berbagai aspek kehidupan pada bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam kasus Kiai di pandeglang dengan segala bentuk strukturasi kekuasaannya, pada dasarnya Kiai menjadi subjek politik baru dimana lahirnya sentrum atau agensi baru dalam penentu arah kebijakan dan kekuasaan di daerah tersebut. Perbedaan ini sangat mencolok jika kita melihat aktifitas Kiai yang memang sedari awal sudah ber-afiliasi dengan partai politik atau semacamnya. Abuya Muhtadi di satu sisi beliau dengan segala pengaruhnya cukup mampu menahan diri untuk tidak ber afiliasi dengan partai politik namu dengan struktur kekuasaan yang ada Kharisma beliau mampu mengubah atau mengontrol kondisi politik daerah dan

nasional. Walaupun misalkan dalam akhir-akhir ini kedekatannya dengan Kiai Ma'ruf Amin tidak dapat di tampilkan sebagai dukungan politik beliau terhadap sosok Kiai yang memilih maju menjadi pejabat publik.

Transformasi yang menjadi tantangan selanjutnya adalah kemampuan dalam mengelola struktur kekuasaan yang sudah terbentuk di Pandeglang, dengan kondisi politik lokal yang penuh dengan klientalistik dari keluarga Natakusumah, menjadi tantangan tersendiri agar Kiai Muhtadi sebagai agen dan struktur kekuasaan yang berpengaruh mampu membuat alternatif baru terhadap isu-isu publik yang selama ini belum muncul dan menjadi perhatian. Transformasi ini harus berlangsung dan harus menjadi agenda yang perlu disadari agar dari struktur kekuasaan yang sudah ada tidak hanya menjadi elite capture daerah yang memanfaatkan dengan baik kebangkitan populisme agama yang terjadi pada saat ini.

### Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada kolega penulis di Untirta terkait berbagai diskusi dan catatan kritisnya sehingga riset ini kaya akan banyak pandangan dan pemikiran.

### Pendanaan

Penelitian ini dilakukan atas pembiayaan dari hibah riset yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (2012). Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral dan Politik. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 15(1), 25–34.
- Abdussalam, I. (2015). Reproduksi Kekuasaan Kiai dan Blater di Kabupaten Bangkalan. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(1).
- Achidsti, S. A. (2014). Eksistensi Kiai dalam Masyarakat. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 12(2), 149–171.
- Adian, D. G. (2010). *Pengantar Fenomenologi*. Depok: Koekosan.
- Bagguley, P. (2003). Reflexivity Contra Structuration. *Canadian Journal of Sociology/Cahiers Canadiens de Sociologie*, 133–152.
- Clark, J., Modgil, C., & Modgil, S. (1990). *Anthony Giddens: Consensus and Controversy* (Vol. 2). Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Research Design). *California: Teller Road*.
- Dhofier, Z. (1981). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Fadhilah, A. (2011). Struktur dan Pola kepemimpinan Kyai dalam Pesantren di Jawa. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(1), 101–120.
- Giddens, A. (1979). Time, Space, Social Change. In *central problems in social theory* (pp.

- 198–233). Springer.
- Giddens, A. (1986). The Nation-State and Violence. *Capital & Class*, 10(2), 216–220.
- Giddens, A. (1998). *Conversations With Anthony Giddens. Making Sense of Modernity*. Stanford University Press.
- Hamid, A. (2010). Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiyai dan Jawara di Banten. *Politika, Jurnal Ilmu Politik*, 1(2).
- Hamid, A. (2011). Pergeseran Peran Kyai dalam Politik di Banten Era Orde Baru dan Reformasi. *Al Qalam*, 28(2), 339–364.
- Hannan, A. (2018). Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuatan Blater dalam Pertarungan Politik Lokal Madura. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2), 187.
- Hikmawan, M. D. (2017). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Hikmawan, M. D. (2020). Consensual democracy: A challenge for Differentiated Citizenship. *International Journal of Innovation, Creativity and Change. Www. Ijcc. Net*, 11.
- Hikmawan, M. D., & Hidayat, R. (2016). Depoliticisation of Public Issue: Low Degree of Government's Democratic Legitimacy (The Case of the Reclamation Policy of Benoa Bay, Bali, Indonesia). *Journal of Governance*, 1(1).
- Hikmawan, M. D., Indriyany, I., & Mayrudin, Y. (2019). Environmental Movement Against Mining Exploration in Bojonegara Serang Banten. In *International Conference on Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)* (pp. 278–282). Atlantis Press.
- Jannah, H. (2015). Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan. *Fikrah*, 3(1), 157–176.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kusmayadi, E., Agung, S., & Ali, M. (2016). Model Kepemimpinan Politik Kyai: Studi Peran Kyai Dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(2), 21–33.
- Migdal, J. S. (1988). *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in The Third World*. Princeton University Press.
- Muslim, A., Kolopaking, L. M., Dharmawan, A. H., & Soetarto, E. (2015). Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 461–474.
- Padilla-Díaz, M. (2015). Phenomenology in Educational Qualitative Research: Philosophy as Science or Philosophical Science? *International Journal of Educational Excellence*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.18562/ijee.2015.0009>
- Sadi, H. S. H. (2016). Kiyai dan politik: Mengintip motif kiai NU (Nahdlatul Ulama) dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi. *Khazanah Pendidikan*, 10(1).

- Sidel, J. T. (2005). Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework for The Study of 'Local Strongmen.' In *Politicising democracy* (pp. 51–74). Springer.
- Suharto. (2001). *Banten in Revolution, 1451-1949: Process Integration In the Unitary State of the Republic of Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Tihami, M. A. (1992). *Kiyai dan Jawara in Banten: Study of Religion, Magic and Leadership in Pasanggrahan village*. Universitas Indonesia.

### Tentang Penulis

- M Dian Hikmawan** adalah dosen Departemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis memiliki area riset seputar: *citizenship*, politik identitas, ekofeminisme, multikulturalisme.
- M. Rizky Godjali** adalah dosen Departemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis memiliki area riset seputar tema gerakan sosial, perbandingan politik, partai politik
- Ika Arinia Indriyany** adalah dosen Departemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis memiliki area riset seputar tema gerakan sosial, gender, dan feminisme.